



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 178.K/HK.02/DJM/2021

TENTANG

DOKUMEN SELEKSI BADAN USAHA PELAKSANA PENUGASAN
PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2022

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* dan dalam rangka pelaksanaan proses seleksi Badan Usaha penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Dokumen Seleksi Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefed Petroleum Gas* untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefed Petroleum Gas* untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 171);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1155);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
9. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 171.K/HK.02/DJM/2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Melalui Penunjukan Langsung dan/atau Seleksi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG DOKUMEN SELEKSI BADAN USAHA PELAKSANA PENUGASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan dokumen seleksi Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tertentu Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini disusun sebagai pedoman bagi Tim Pelaksana Proses Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu dalam melaksanakan seleksi Badan Usaha untuk penugasan penyediaan dan pendistribusian atas volume penjualan tahunan LPG Tertentu pada Wilayah Distribusi LPG Tertentu Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 November 2021

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Ditandatangani secara elektronik

TUTUKA ARIADJI

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
5. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 178.K/HK.02/DJM/2021

TANGGAL : 17 November 2021

TENTANG

DOKUMEN SELEKSI BADAN USAHA PELAKSANA PENUGASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2022

**DOKUMEN SELEKSI BADAN USAHA PELAKSANA PENUGASAN
PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG TERTENTU
TAHUN ANGGARAN 2022**

A. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PENUGASAN

1. Ruang Lingkup Penugasan

Badan Usaha diberikan penugasan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu Tahun Anggaran 2022 sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, pada Wilayah Distribusi LPG Tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan harga jual eceran sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam pelaksanaan penugasan, fasilitas, sarana dan prasarana serta lembaga penyalur dan sub penyalur yang dimiliki dan/atau dikuasai Badan Usaha yang akan menyalurkan LPG Tertentu harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lokasi Penugasan

Lokasi Penugasan adalah Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang dapat dipilih oleh Badan Usaha.

B. HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak Badan Usaha

Badan Usaha yang menerima penugasan berhak mendapatkan pembayaran subsidi penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu Tahun Anggaran 2022 dengan tata cara pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

2. Kewajiban Badan Usaha

- a. menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian LPG Tertentu Tahun Anggaran 2022;
- b. menjamin harga jual eceran LPG Tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjamin mutu pelayanan kepada rumah tangga, usaha mikro, kapal penangkap ikan bagi nelayan sasaran, dan mesin pompa air bagi petani sasaran pengguna LPG Tertentu;
- d. menjamin berat isi dan mutu serta standar keamanan LPG Tertentu;
- e. melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap Stasiun Pengisian (dan Pengangkutan) Bulk Elpiji (SP(P)BE), Penyalur dan Sub Penyalur LPG Tertentu;
- f. menyediakan dan menjelaskan prosedur penggunaan tabung LPG Tertentu yang aman kepada masyarakat;
- g. menyampaikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai rencana 1 (satu) tahun penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu di Wilayah Distribusi LPG Tertentu;
- h. menyampaikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai rencana cadangan operasional per terminal-transit/instalasi/depot untuk mencukupi ketersediaan LPG Tertentu;
- i. menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas realisasi penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu secara periodik setiap bulan, triwulan, dan tahun;

- j. menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai penunjukan SP(P)BE, penyalur dan sub penyalur dalam rantai penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu secara periodik setiap bulan;
- k. mendukung dan mensosialisasikan pelaksanaan verifikasi penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu beserta metodenya di SP(P)BE dan lembaga penyalur dan apabila diperlukan pelaksanaan verifikasi terhadap pemeliharaan LPG tabung 3 kilogram;
- l. mempersiapkan data dan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan pengawasan dan verifikasi kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu setiap bulan dan triwulan serta uji petik oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- m. membangun sistem informasi penyaluran LPG Tertentu untuk mengetahui informasi realisasi penjualan harian LPG Tertentu;
- n. memberikan akses penuh sistem informasi penyaluran LPG Tertentu untuk mengetahui informasi realisasi penjualan harian LPG Tertentu serta penggunaannya kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk keperluan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu; dan
- o. mencegah dan/atau mengatasi terjadinya kekurangan pasok/ ketidaklancaran distribusi LPG Tertentu serta melaporkan langkah-langkah yang ditempuh kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

C. JANGKA WAKTU PENUGASAN

Jangka waktu penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu adalah dihitung mulai **1 Januari 2022** pukul 00.00 sampai dengan **31 Desember 2022** pukul 23.59 waktu setempat.

D. VOLUME PENUGASAN

1. Besaran kuota volume penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu berdasarkan penetapan kuota oleh Pemerintah sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022 dan Perubahannya.

2. Kuota volume penugasan untuk masing-masing Badan Usaha ditentukan dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu Tahun 2022.

E. HARGA PATOKAN DAN HARGA JUAL ECERAN LPG TERTENTU

1. Harga jual eceran LPG Tertentu di titik serah, untuk setiap kilogram merupakan nominal tetap yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Harga patokan LPG Tertentu mengacu formula yang didasarkan pada harga indeks pasar LPG yang berlaku pada bulan yang bersangkutan ditambah biaya distribusi (termasuk *handling*) dan margin usaha yang wajar.
3. Ketentuan harga jual eceran dan harga patokan LPG Tertentu pada lokasi penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. SUBSIDI LPG TERTENTU

1. Subsidi LPG Tertentu merupakan pengeluaran negara yang dibayarkan melalui Badan Usaha.
2. Besaran subsidi LPG Tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. TATA CARA PEMBAYARAN SUBSIDI

1. Pembayaran atas subsidi LPG Tertentu dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
2. Tata cara pembayaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. PENYALUR LPG TERTENTU

1. Dalam menjalankan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha wajib mendistribusikan LPG Tertentu kepada konsumen pengguna melalui Penyalur yang ditunjuk melalui seleksi dan dapat menunjuk Sub Penyalur berdasarkan usulan Penyalur.

2. Badan Usaha wajib melampirkan data mengenai nama Penyalur, lokasi beserta titik koordinat Penyalur, rencana penyaluran LPG Tertentu per bulan di Penyalur, jumlah Sub Penyalur, lokasi Sub Penyalur beserta titik koordinatnya, dan rencana penyaluran LPG Tertentu per bulan di Sub Penyalur dalam Dokumen Seleksi.
3. Badan Usaha bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu sampai dengan Penyalur dan Sub Penyalur.
4. Penyalur wajib memiliki sarana dan fasilitas penyimpanan (gudang) dan pengangkutan tabung LPG.
5. Dalam pelaksanaan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu, Penyalur dan Sub Penyalur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Badan Usaha.

I. EVALUASI BADAN USAHA

Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu Tahun Anggaran 2022 yang tidak memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. PEDOMAN SELEKSI

Tata cara pengajuan oleh Badan Usaha dilakukan dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:

1. DOKUMEN PERSYARATAN KUALIFIKASI

- a. Izin Usaha Niaga LPG;
- b. Dokumen sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG yang meliputi fasilitas pengangkutan, penyimpanan (*storage*), pengisian tabung LPG (*bottling plant*), penyediaan tabung LPG Tertentu dan fasilitas pemeliharaan tabung, yang dibuktikan dengan:
 - 1) dokumen kepemilikan fasilitas; dan/atau
 - 2) salinan kesepakatan bersama dan/atau kontrak kerja sama untuk penguasaan fasilitas.
- c. Dokumen jaringan distribusi sampai dengan Penyalur LPG yang dibuktikan dengan daftar seluruh Penyalur LPG beserta periode kontrak;

- d. Dokumen jaminan pasokan LPG yang dibuktikan dengan:
 - a) kesepakatan awal perjanjian jual beli LPG, salinan rekomendasi impor, atau salinan dokumen kontrak jual beli; dan
 - b) salinan spesifikasi LPG yang akan diniagakan.
- e. Dokumen kemampuan pendanaan yang dibuktikan dengan:
 - a) laporan keuangan 3 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun; dan
 - b) surat keterangan dari Bank Pemerintah yang mencantumkan nominal dana atau jaminan dari pihak lain yang dibuktikan dengan perjanjian pinjaman dana.
- f. Dokumen jaminan cadangan operasional LPG Tertentu minimum selama 11 (sebelas) hari yang dihitung dari rencana volume penyaluran harian rata-rata penugasan yang dibuktikan dengan:
 - a) jaminan pasokan;
 - b) daftar seluruh fasilitas penyimpanan LPG (Depot); dan
 - c) surat pernyataan kesanggupan memiliki jaminan cadangan LPG di Terminal LPG/Depot.
- g. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas pelaksanaan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.

2. DOKUMEN PERSYARATAN LAINNYA

a. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI

- 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha, struktur Direksi dan Komisaris Badan Usaha, dan riwayat kinerja (*track record*) Badan Usaha;
- 2) Surat pernyataan kesanggupan keikutsertaan dalam seleksi penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu yang ditandatangani oleh Direktur Utama Badan Usaha yang bersangkutan;
- 3) Surat permohonan mengikuti proses seleksi dan penyampaian Dokumen Seleksi Tahun Anggaran 2022 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Badan Usaha yang bersangkutan;
- 4) Rencana kerja dan anggaran pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu pada Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang akan ditawarkan untuk 1 (satu) tahun anggaran.

- 5) Surat pernyataan mematuhi persyaratan administrasi yang ditandatangani oleh Direktur Utama Badan Usaha bersangkutan di atas materai dan dibubuhi tanggal, berisi antara lain:
- a) kesanggupan untuk melaksanakan penugasan serta kewajiban apabila dinyatakan sebagai pemenang seleksi;
 - b) tunduk pada hasil seleksi yang diumumkan oleh Tim Pelaksana Proses Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu;
 - c) data dan dokumen yang disampaikan dalam Dokumen Seleksi adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - d) tidak sedang dalam sengketa hukum dalam penyediaan dan pendistribusian LPG. Apabila di kemudian hari terdapat sengketa hukum, tidak akan melibatkan Kementerian ESDM.

b. DOKUMEN PERSYARATAN TEKNIS

- 1) Rencana penyediaan LPG Tertentu selama masa penugasan, baik yang berasal dari produksi kilang dalam negeri dan/atau impor LPG Tertentu (volume penyediaan dalam satuan kilogram);
- 2) Surat pernyataan mematuhi persyaratan teknis yang ditandatangani oleh Direktur Utama Badan Usaha bersangkutan di atas materai dan dibubuhi tanggal, yang berisi antara lain:
 - a) kesanggupan mengenai pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu pada Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang akan ditawarkan berdasarkan kaidah keteknikan yang baik, antara lain memenuhi spesifikasi dan standar pada fasilitas penyimpanan dan pendistribusian LPG yang dimiliki dan/atau dikuasai Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kesanggupan untuk melaporkan rencana pengembangan infrastruktur pada fasilitas penyimpanan dan pendistribusian LPG yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Badan Usaha dalam melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu sebelum masa penugasan;

- c) kesanggupan untuk membangun sistem teknologi informasi dalam rangka pemantauan dan penghitungan realisasi volume LPG Tertentu yang telah disalurkan kepada konsumen pengguna selama masa penugasan; dan
- d) kesanggupan untuk mengutamakan penyediaan LPG Tertentu dari produksi kilang dalam negeri.

c. DOKUMEN PERSYARATAN FINANSIAL DAN KOMERSIAL

- 1) Surat pernyataan mematuhi persyaratan finansial dan komersial yang ditandatangani oleh Direktur Utama Badan Usaha bersangkutan di atas materai dan dibubuhi tanggal, yang berisi antara lain:
 - a) Badan Usaha memiliki kemampuan finansial dan komersial untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu di lokasi penugasan; dan
 - b) Badan Usaha menyetujui tata cara pembayaran subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama Badan Usaha bersangkutan di atas materai dan dibubuhi tanggal yang menyampaikan usulan biaya penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.

K. PEMASUKAN DOKUMEN SELEKSI

Dokumen Seleksi dari Badan Usaha disampaikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melalui email **dmoh.migas@esdm.go.id** dan disampaikan secara langsung kepada Tim Pelaksana Proses Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu paling lambat pada tanggal **6 Desember 2021 pukul 14.00 WIB** dengan mencantumkan nomor HP *person in charge* (PIC) yang ditugaskan sebagai perwakilan resmi Badan Usaha. Pengecekan kelengkapan dokumen akan dilakukan secara *online* dan/atau *offline* pada tanggal **6 Desember 2021 pukul 14.01 WIB**.

- 1. Subject email sebagai berikut:

LPG3KG (spasi) – (spasi) NAMA BADAN USAHA

2. Kata Pengantar email sebagai berikut:

Yang Terhormat:

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
U.p. Tim Pelaksana Proses Penugasan LPG Tertentu
Tahun 2022

Gedung Ibnu Sutowo L2t.12
Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-5
Jakarta 12910

(Nama dan Nomor HP PIC)

3. Kata Pengantar penyampaian dokumen seleksi:

Yang Terhormat:

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
U.p. Tim Pelaksana Proses Penugasan LPG Tertentu
Tahun 2022

Gedung Ibnu Sutowo Lt.12
Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-5
Jakarta 12910

(Nama dan Nomor HP PIC)

L. TATA WAKTU PROSES SELEKSI

| Tahapan Kegiatan | Kegiatan | Tanggal Perkiraan Pelaksanaan |
|-------------------------|--|--------------------------------------|
| Tahap Ke-1 | Menyampaikan undangan dan Dokumen Seleksi melalui pos dan email | 19 Nov 2021 |
| Tahap Ke-2 | 1. Penjelasan Konsep Penugasan LPG Tertentu Tahun Anggaran 2022 kepada Badan Usaha 2. Penjelasan Dokumen Seleksi LPG kepada Badan Usaha | 24 Nov 2021 |
| Tahap Ke-3 | Berita Acara Kesanggupan keikutsertaan dalam penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu | 29 Nov 2021 |
| Tahap Ke-4 | Pemasukan Dokumen Seleksi oleh Badan Usaha dan Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Seleksi | 6 Des 2021 |

| | | |
|-------------|--|------------------------------|
| Tahap Ke-5 | Evaluasi Dokumen Seleksi Badan Usaha | 7 s.d 10 Des 2021 |
| Tahap Ke-6 | Pemaparan & Klarifikasi Dokumen Seleksi oleh Badan Usaha | 13 Des 2021 |
| Tahap Ke-7 | Pembahasan Hasil Evaluasi Dokumen Seleksi dan Persiapan Verifikasi Lapangan Penyalur Badan Usaha | 15 Des 2021 |
| Tahap Ke-8 | Verifikasi Lapangan Penyalur Badan Usaha | 16 s.d 19 Des 2021 |
| Tahap ke-9 | Rapat Tim Pelaksana Proses Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu: Pembahasan Hasil Verifikasi Lapangan Badan Usaha | 20 Des 2021 |
| Tahap Ke-10 | Penetapan Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu Tahun Anggaran 2022 | 21 s.d 24 Des 2021 |
| Tahap Ke-11 | Pengumuman Badan Usaha pemenang seleksi sebagai pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu | 28 Des 2021 |
| Tahap Ke-12 | Penyerahan Surat Keputusan Penugasan dan Berita Acara kepada Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu Tahun Anggaran 2022 | 29 Des 2021 |
| Tahap Ke-13 | Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Penugasan Badan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu Tahun Anggaran 2022 | 30 Des 2021 s.d. 31 Des 2021 |

M. TATA CARA PENILAIAN

1. PEMENUHAN KUALIFIKASI DAN ADMINISTRASI

Pemenuhan persyaratan kualifikasi dan persyaratan lainnya (persyaratan administrasi, teknis, finansial dan komersial) dari calon Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan **sistem gugur**. Jika salah satu persyaratan tidak dilengkapi maka Badan Usaha tersebut gugur dan tidak masuk pada tahap selanjutnya.

2. PENILAIAN TEKNIS, KEUANGAN, BIAYA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG TERTENTU, DAN KINERJA

Penilaian teknis, keuangan, biaya penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu, dan kinerja dilakukan dengan memberikan nilai pada setiap parameter sehingga dapat menilai kemampuan teknis, keuangan, biaya penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu, dan kinerja setiap calon Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu Tahun Anggaran 2022.

- a) Penilaian teknis dilakukan untuk mengetahui ketersediaan pasokan LPG Tertentu dan kesiapan infrastruktur pada fasilitas penyimpanan (*storage*), pengisian tabung LPG (*bottling plant*) dan fasilitas pendistribusian Badan Usaha.
- b) Penilaian keuangan dilakukan analisa terhadap laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun, dan surat keterangan dari Bank Pemerintah yang mencantumkan nominal dana atau jaminan dari pihak lain yang dibuktikan dengan perjanjian pinjaman dana untuk dapat dilakukan analisa terkait Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Profitabilitas.
 - 1) Rasio Likuiditas: untuk mengetahui kemampuan Badan Usaha membayar hutang jangka pendek, dengan rumus aset lancar dibagi dengan hutang jangka pendek;
 - 2) Rasio Solvabilitas: untuk mengetahui kemampuan Badan Usaha membayar seluruh kewajibannya baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang, dengan rumus jumlah hutang dibagi dengan jumlah ekuitas/modal; dan
 - 3) Rasio Profitabilitas: untuk mengetahui kemampuan Badan Usaha menghasilkan laba, dengan rumus laba kotor dibagi dengan penjualan bersih.
- c) Penilaian biaya penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dilakukan analisa terhadap usulan harga patokan.

- d) Penilaian kinerja dilakukan analisis terhadap pengalaman di bidang penyediaan dan pendistribusian LPG serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. HASIL PENILAIAN

- a) Badan Usaha yang memenuhi kualifikasi selanjutnya akan memasuki tahap klarifikasi yang berkenaan dengan penilaian teknis, keuangan, usulan biaya penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dan kinerja.
- b) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan verifikasi *on desk* dan melakukan verifikasi lapangan terhadap kesiapan infrastruktur Badan Usaha.
- c) Hasil penilaian teknis berupa rekapitulasi penilaian terhadap parameter teknis.
- d) Hasil penilaian keuangan berupa rekapitulasi penilaian terhadap parameter keuangan.
- e) Hasil penilaian usulan biaya penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu berupa rekapitulasi penilaian terhadap parameter usulan biaya penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.
- f) Hasil penilaian kinerja berupa rekapitulasi penilaian terhadap parameter kinerja.
- g) Hasil akhir terhadap penilaian teknis, keuangan, usulan biaya penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dan kinerja akan dilakukan penghitungan dengan pembobotan sebagai berikut:
- | | |
|-----------------|-------|
| 1) Teknis | : 45% |
| 2) Keuangan | : 30% |
| 3) Usulan biaya | : 20% |
| 4) Kinerja | : 5% |
- h) Pada rekapitulasi penilaian akhir dari aspek penilaian teknis, keuangan, usulan biaya penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dan kinerja ditetapkan ambang batas nilai ≥ 75 sebagai acuan kelolosan Badan Usaha pada proses Seleksi.
- i) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Proses Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

- j) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengumumkan Badan Usaha pemenang seleksi sebagai pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu melalui website migas.esdm.go.id.
- k) Hasil penilaian dan penetapan pemenang seleksi sebagai pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu bersifat final dan mengikat.

N. LAIN-LAIN

1. Dokumen seleksi yang diterima oleh Tim Pelaksana Proses Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu akan menjadi milik Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang bersifat rahasia dan hanya dapat dibuka kepada pihak lain untuk keperluan yang dapat dibenarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi akan melakukan penyesuaian Dokumen Seleksi dan/atau penugasan dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah.

O. STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) LPG TABUNG 3 KG

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 116.K/10/DJM/2020 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Gas Jenis *Liquefied Petroleum Gas* yang Dipasarkan di Dalam Negeri:

| No. | Karakteristik | Satuan | Batasan | | Metode Uji | |
|-----|----------------------------------|-------------------------|---------------------|-------|---------------------------|--------|
| | | | Min. | Maks. | ASTM | Lain |
| 1. | Berat Jenis Relatif pada 60/60°F | - | Dilaporkan | | D1657/ D2598 | IP 432 |
| 2. | Tekanan Uap pada 100°F | Psig | - | 145 | D1267/ D6897/ D2598 | IP 432 |
| 3. | Korosi Bilah Tembaga | 1 jam/100°F | - | No. 1 | D2598 | - |
| 4. | Kandungan Sulfur Total | <i>grains</i> /100 cuft | - | 15 | D1838 | - |
| 5. | Kandungan Air | - | Tidak ada air bebas | | - | Visual |
| 6. | Komposisi | | | | D2163 | - |
| | C ₂ | %vol | - | 0,8 | | |

| | | | | | | |
|--|--|------------|-------------------|------|------------------|----------------|
| | C ₃ dan C ₄ | %vol | 97,0 | - | | |
| | C ₅₊ (C ₅ dan kandungan hidrokarbon lain yang lebih berat) | %vol | - | 2,0 | | |
| 7. | Etil atau Butil Merkaptan | lb/1000 AG | 1,0 | - | - | |
| Untuk pengawasan disamping karakteristik tersebut diatas atau yang disepakati wajib ditambah karakteristik berikut | | | | | | |
| | Residu, Salah satu dari persyaratan ini harus dipenuhi | | | | | |
| 8. | 1. Residu pada Penguapan 100 ml, dan | Ml | - | 0,05 | D2158 | |
| | Pemeriksaan Noda Minyak | | Lulus* | | | |
| | Atau | | | | | |
| | 2. Residu dengan <i>Gas Chromatography</i> | Mg/kg | - | 350 | D7756 | |
| | Atau | | | | | |
| | 3. Residu dengan <i>Mass Analysis Method</i> | | | | | JLPG A-S-03 |
| Pada 75°C | Ppm | - | 60 | | | |
| Pada 105°C | Ppm | - | 10 | | | |
| | Penampilan Visual | | Jernih dan terang | | | |
| 9. | Etil atau BUtil Merkaptan | lb/1000 AG | 1,0 | - | D5305 / D5504 | - |

*produk dapat diterima jika tidak menimbulkan *oil ring* (noda minyak berwujud cincin) ketika 0,3 ml campuran residu dan pelarut diteteskan ke kertas saring secara berangsur dengan volume 0,1 ml per penambahan dan pemeriksaan keberadaan *oil ring* dilakukan 2 menit sesudah tiap penambahan termaksud dengan menempatkan kertas saring diantara mata dan sumber cahaya terang.

P. FORMAT SURAT

KOP SURAT PERUSAHAAN

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MEMILIKI JAMINAN CADANGAN OPERASIONAL LPG**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat perusahaan :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa perusahaan kami sanggup untuk memiliki jaminan cadangan operasional di Terminal LPG/Depot LPG yang mampu untuk menjaga ketersediaan LPG Tertentu melalui fasilitas yang dimiliki dan/atau dikuasai pada Lokasi Penugasan.

Surat Pernyataan ini dibuat dalam rangka pelaksanaan penugasan untuk Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu Tahun Anggaran 2022.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

....., 2021

PT.....

Direktur Utama,

Materai Rp10.000

Tanda Tangan dan Cap Basah

Nama Jelas

KOP SURAT PERUSAHAAN

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
ATAS PELAKSANAAN PENUGASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
LPG TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Perusahaan :

Alamat perusahaan :

Bertindak untuk dan atas nama PT. _____ (diisi nama perusahaan) dalam rangka Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu Tahun Anggaran 2022 menyatakan bahwa sanggup dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu yang ditugaskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini dibuat dalam rangka pelaksanaan penugasan untuk Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu Tahun Anggaran 2022.

Demikian Surat Pertanggung Jawaban Mutlak ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

....., 2021

PT.....

Direktur Utama,

Materai Rp10.000

Tanda Tangan dan Cap Basah

Nama Jelas

KOP SURAT PERUSAHAAN

**SURAT KESANGGUPAN KEIKUTSERTAAN
DALAM SELEKSI PENUGASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
LPG TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2022**

..... 2021

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Kesanggupan Keikutsertaan Dalam Seleksi
Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian
LPG Tertentu Tahun Anggaran 2022

Yang terhormat,

**DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
U.p. Tim Penugasan LPG Tertentu Tahun 2021**

Gedung Ibnu Sutowo Lt.12
Jl. H. R. Rasuna Said Kav B-5
Jakarta 12910

Sehubungan dengan diselenggarakannya seleksi Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu Tahun Anggaran 2022, bersama ini kami bertindak untuk dan atas nama PT..... menyampaikan kesanggupan keikutsertaan dalam seleksi penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu Tahun Anggaran 2022.

Surat ini dibuat dalam rangka pelaksanaan penugasan untuk Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu Tahun Anggaran 2022.

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar dapat menjadi bahan pertimbangan. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
Direktur Utama,

Materai Rp10.000
Tanda Tangan dan Cap Basah

Nama Jelas

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERMOHONAN

..... 2021

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Permohonan Mengikuti Seleksi dan
Penyampaian Dokumen Seleksi Penugasan Penyediaan
dan Pendistribusian LPG Tertentu Tahun Anggaran 2022

Yang terhormat,

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

U.p. Tim Penugasan LPG Tertentu Tahun 2021

Gedung Ibnu Sutowo Lt.12
Jl. H. R. Rasuna Said Kav B-5
Jakarta 12910

Sehubungan dengan diselenggarakannya seleksi Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu Tahun Anggaran 2022, bersama ini kami bertindak untuk dan atas nama PT..... menyampaikan surat permohonan untuk dapat mengikuti proses Seleksi Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu Tahun Anggaran 2022. Untuk itu terlampir kami sampaikan dokumen persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Seleksi Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu Tahun Anggaran 2022.

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar dapat menjadi bahan pertimbangan. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
Direktur Utama,

Materai Rp10.000

Tanda Tangan dan Cap Basah

Nama Jelas

KOP SURAT PERUSAHAAN

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MEMATUHI PERSYARATAN ADMISNISTRASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat perusahaan :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa:

1. Perusahaan kami menerima dan sanggup melaksanakan penugasan serta kewajibannya apabila dinyatakan sebagai pemenang seleksi.
2. Perusahaan kami tunduk dan patuh pada hasil seleksi yang diumumkan oleh Tim Pelaksana Proses Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu.
3. Data dan dokumen yang kami sampaikan dalam Dokumen Seleksi adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Perusahaan kami tidak sedang dalam sengketa hukum dalam penyediaan dan pendistribusian LPG. Apabila di kemudian hari terdapat sengketa hukum, maka tidak akan melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Surat Pernyataan ini dibuat dalam rangka pelaksanaan penugasan untuk Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu Tahun Anggaran 2022.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

....., 2021

PT.....

Direktur Utama,

Materai Rp10.000

Tanda Tangan dan Cap Basah

Nama Jelas

KOP SURAT PERUSAHAAN

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MEMATUHI PERSYARATAN TEKNIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat perusahaan :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa:

1. Perusahaan kami sanggup melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu pada Wilayah Distribusid LPG Tertentu yang akan ditawarkan berdasarkan kaidah keteknikan yang baik antara lain spesifikasi dan standar pada fasilitas penyimpanan dan pendistribusian LPG yang dimiliki dan/atau dikuasai Badan Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Perusahaan kami sanggup untuk melaporkan rencana pengembangan infrastruktur pada fasilitas penyimpanan dan pendistribusian LPG yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Badan Usaha dalam melaksanakan Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu sebelum masa penugasan.
3. Perusahaan kami sanggup untuk membangun sistem teknologi informasi dalam rangka pemantauan dan penghitungan realisasi volume LPG Tertentu yang telah disalurkan kepada konsumen pengguna selama masa penugasan.
4. Perusahaan kami sanggup untuk mengutamakan penyediaan LPG Tertentu dari produksi kilang dalam negeri.

Surat Pernyataan ini dibuat dalam rangka pelaksanaan penugasan untuk Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu Tahun Anggaran 2022.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

....., 2021

PT.....

Direktur Utama,

Materai Rp10.000

Tanda Tangan dan Cap Basah

Nama Jelas

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN MEMATUHI PERSYARATAN FINANSIAL DAN KOMERSIAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat perusahaan :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa:

1. Perusahaan kami memiliki kemampuan Finansial dan Komersial untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu di wilayah penugasan; dan
2. perusahaan kami menyetujui tata cara pembayaran subsidi sebagaimana ketentuan peraturan yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Surat Pernyataan ini dibuat dalam rangka pelaksanaan penugasan untuk Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu Tahun Anggaran 2022.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

....., 2021

PT.....

Direktur Utama,

Materai Rp10.000

Tanda Tangan dan Cap Basah

Nama Jelas

Q. FORMULIR APLIKASI

DOKUMEN SELEKSI LPG TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Direktur Utama Perusahaan
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi :
Pasokan LPG :
Jumlah dan kapasitas
Penyimpanan (*storage*) :
Jumlah dan kapasitas
Pengisian tabung LPG (*bottling
plant*) :
Jumlah Tabung LPG Tertentu :
Jumlah Penyalur :
Jumlah Sub Penyalur :
Realiasi Penjualan Tahun 2020
(MTon) perwilayah penyaluran :
Cadangan Operasional LPG :

....., 2021

PT.....

Direktur Utama,

Materai Rp. 10.000,-

Tanda Tangan dan Cap

Basah

Nama Jelas

R. FORMULIR PEMENUHAN KUALIFIKASI

| KUALIFIKASI | ADA/ TIDAK ADA |
|---|---------------------------|
| <p>1. Dokumen Sarana dan Fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG yang meliputi fasilitas pengangkutan, penyimpanan (<i>storage</i>), pengisian tabung LPG (<i>bottling plant</i>), penyediaan tabung LPG Tertentu, dan fasilitas pemeliharaan tabung, yang dibuktikan dengan:</p> <p>a. dokumen kepemilikan fasilitas; dan/atau</p> <p>b. salinan kesepakatan bersama dan/atau kontrak kerja sama untuk penguasaan fasilitas.</p> | |
| <p>2. Dokumen Jaringan distribusi sampai dengan Penyalur, yang dibuktikan dengan daftar seluruh Penyalur LPG beserta tanggal berakhirnya kontrak.</p> | |
| <p>3. Dokumen jaminan pasokan LPG yang dibuktikan dengan kesepakatan awal perjanjian jual beli LPG, salinan rekomendasi impor atau salinan dokumen kontrak jual serta salinan spesifikasi LPG yang akan diniagakan.</p> | |
| <p>4. Dokumen kemampuan pendanaan yang dibuktikan dengan:</p> <p>a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun; dan</p> <p>b. surat keterangan dari Bank Pemerintah yang mencantumkan nominal dana atau jaminan dari pihak lain yang dibuktikan dengan perjanjian pinjaman dana.</p> | |
| <p>5. Surat Pernyataan kesanggupan untuk memiliki cadangan operasional LPG di Terminal LPG/Depot yang mampu untuk menjaga ketersediaan LPG Tertentu melalui fasilitas yang dimiliki dan/atau dikuasai pada Lokasi Penugasan.</p> | |
| <p>6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Pelaksanaan Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu.</p> | |

S. FORMULIR PEMENUHAN ADMINISTRASI, TEKNIS, FINANSIAL DAN KOMERSIAL

| ADMINISTRASI | ADA/ TIDAK ADA |
|--|---------------------------|
| <p>1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha, Struktur Direksi dan Komisaris Badan Usaha, dan Riwayat Kinerja (<i>track record</i>) Badan Usaha.</p> | |

| | |
|---|--|
| 2. Surat kesanggupan keikutsertaan dalam seleksi penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu yang ditandatangani oleh Direktur Utama Badan Usaha yang bersangkutan. | |
| 3. Surat penyampaian Dokumen Seleksi penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu Tahun Anggaran 2022 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Badan Usaha yang bersangkutan. | |
| 4. Formulir aplikasi yang telah diisi secara lengkap dan benar dan ditandatangani oleh Direktur Utama Badan Usaha yang bersangkutan. | |
| 5. Rencana kerja dan anggaran pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu pada Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang akan ditawarkan untuk 1 (satu) tahun APBN. | |
| 6. Surat Pernyataan mematuhi persyaratan administrasi yang ditandatangani oleh Direktur Utama Badan Usaha bersangkutan di atas materai dan dibubuhi tanggal, berisi antara lain: a. kesanggupan untuk melaksanakan penugasan serta kewajibannya apabila dinyatakan sebagai pemenang seleksi; b. tunduk pada hasil seleksi yang diumumkan oleh Tim Pelaksana Proses Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu; c. data dan dokumen yang disampaikan kepada Ditjen Migas dalam Dokumen Seleksi adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan; dan d. tidak sedang dalam sengketa hukum dalam penyediaan dan pendistribusian LPG. Apabila di kemudian hari terdapat sengketa hukum, tidak akan melibatkan Kementerian ESDM. | |
| 7. Rencana penyediaan LPG Tertentu selama masa penugasan, baik yang berasal dari produksi kilang dalam negeri dan/atau impor LPG Tertentu (volume penyediaan dalam satuan Kilogram). | |
| 8. Surat Pernyataan mematuhi persyaratan teknis yang ditandatangani oleh Direktur Utama Badan Usaha bersangkutan di atas materai dan dibubuhi tanggal, yang berisi antara lain: a. kesanggupan mengenai pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu pada Wilayah Distribusi LPG Tertentu yang akan ditawarkan berdasarkan kaidah keteknikan yang baik antara lain memenuhi spesifikasi dan standar pada fasilitas penyimpanan dan pendistribusian LPG yang dimiliki dan/atau dikuasai Badan Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan; | |

| | |
|--|--|
| <p>b. kesanggupan untuk melaporkan rencana pengembangan infrastruktur pada fasilitas penyimpanan dan pendistribusian LPG yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Badan Usaha dalam melaksanakan Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu sebelum masa penugasan;</p> <p>c. kesanggupan untuk membangun sistem teknologi informasi dalam rangka pemantauan dan penghitungan realisasi volume LPG Tertentu yang telah disalurkan kepada konsumen pengguna selama masa penugasan; dan</p> <p>d. kesanggupan untuk mengutamakan penggunaan LPG Tertentu dari produksi kilang dalam negeri.</p> | |
| <p>9. Surat pernyataan mematuhi persyaratan finansial dan komersial, yang ditandatangani oleh Direktur Utama Badan Usaha bersangkutan di atas materai dan dibubuhi tanggal, yang berisi antara lain:</p> <p>a. Badan Usaha memiliki kemampuan finansial dan komersial untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu di Lokasi Penugasan; dan</p> <p>b. Badan Usaha menyetujui tata cara pembayaran subsidi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.</p> | |
| <p>10. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama Badan Usaha bersangkutan di atas materai dan dibubuhi tanggal yang menyampaikan usulan biaya penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu.</p> | |

T. FORMULIR PENILAIAN TEKNIS

| No | PARAMETER | NILAI |
|-----------|--|--------------|
| 1 | Sumber Pasokan | |
| 2 | Status Kepemilikan Fasilitas Penyimpanan | |
| 3 | Kapasitas Fasilitas Penyimpanan | |
| 4 | Kapasitas Pengisian Tabung LPG | |
| 5 | Fasilitas Pendistribusian | |
| 6 | Kemampuan Penyediaan Tabung LPG | |
| TOTAL | | |

PENILAIAN:

1. SUMBER PASOKAN

| SUMBER PASOKAN | NILAI |
|--------------------------------------|--------------|
| Kilang Dalam Negeri > Impor | 100 |
| Kilang Dalam Negeri ≤ Impor | 50 |
| Badan Usaha Lain (Dalam Negeri) 100% | 25 |

Merupakan persentase dari rencana total sumber pasok tahun 2022

2. STATUS KEPEMILIKAN FASILITAS PENYIMPANAN

| STATUS KEPEMILIKAN FASILITAS PENYIMPANAN | NILAI |
|---|--------------|
| Milik Sendiri 76-100%, Sewa 0-24% | 100 |
| Milik Sendiri 51-75%, Sewa 25-49% | 75 |
| Milik Sendiri 26-50%, Sewa 50-74% | 50 |
| Milik Sendiri 1-25%, Sewa 75-99% | 25 |
| Milik Sendiri 0%, Sewa 100% | 0 |

Merupakan persentase dari jumlah kapasitas penyimpanan

3. KAPASITAS FASILITAS PENYIMPANAN

| KAPASITAS FASILITAS PENYIMPANAN | NILAI |
|--|--------------|
| Kapasitas Penyimpanan > 11 hari Cadangan Operasional | 100 |
| Kapasitas Penyimpanan = 11 hari Cadangan Operasional | 50 |
| Kapasitas Penyimpanan < 11 hari Cadangan Operasional | 0 |

Cadangan operasional dihitung dari rencana rata-rata volume penyaluran harian /DOT Tahun 2022.

4. KAPASITAS PENGISIAN TABUNG LPG

| KAPASITAS FASILITAS PENGISIAN TABUNG LPG | NILAI |
|---|--------------|
| Kemampuan Pengisian Tabung LPG 100% | 100 |
| Kemampuan Pengisian Tabung LPG 75%- 99% | 50 |
| Kemampuan Pengisian Tabung LPG 50%-74% | 25 |
| Kemampuan Pengisian Tabung < 50% | 0 |

Pengisian tabung merupakan jumlah tabung yang dapat diisi dalam 1 (satu) hari dibagi dengan jumlah penjualan tabung dalam 1 (satu) hari berdasarkan wilayah yang ditawarkan.

5. FASILITAS PENDISTRIBUSIAN

| FASILITAS PENDISTRIBUSIAN | NILAI |
|---|-------|
| Persen sub penyalur sebesar 75% -100% | 100 |
| Persen sub penyalur sebesar 50% -74% | 75 |
| Persen sub penyalur sebesar 25% - 49% | 50 |
| Persen sub penyalur sebesar kurang dari 25% | 0 |

Persen sub penyalur merupakan jumlah rencana sub penyalur dibagi dengan jumlah sub penyalur yang dibutuhkan.

Sub penyalur yang dibutuhkan merupakan volume penugasan bulanan dibagi kuota maksimal sub penyalur per bulan (2.000 tabung per bulan).

6. KEMAMPUAN PENYEDIAAN TABUNG LPG

| KEMAMPUAN PENYEDIAAN TABUNG LPG | NILAI |
|--|-------|
| Kemampuan penyediaan tabung Badan Usaha sebesar ≥ 2 kali kuota harian penugasan | 100 |
| Kemampuan penyediaan tabung Badan Usaha sebesar sebesar > 1 (satu) kali kuota harian penugasan dan < 2 (dua) kali kuota harian penugasan | 50 |
| Kemampuan penyediaan tabung Badan Usaha \leq kuota harian penugasan | 0 |

U. FORMULIR PENILAIAN KEUANGAN

| No | PARAMETER | NILAI |
|-------|----------------|-------|
| 1 | Likuiditas | |
| 2 | Solvabilitas | |
| 3 | Profitabilitas | |
| TOTAL | | |

PENILAIAN:

1. LIKUIDITAS

| LIKUIDITAS | NILAI |
|-----------------------------------|-------|
| Rasio Likuiditas > 1 | 100 |
| Rasio Likuiditas $\geq 0, \leq 1$ | 50 |
| Rasio Likuiditas < 0 | 0 |

2. SOLVABILITAS

| SOLVABILITAS | NILAI |
|-------------------------------------|-------|
| Rasio Solvabilitas < 1 | 100 |
| Rasio Solvabilitas $\geq 1, \leq 2$ | 50 |
| Rasio Solvabilitas > 2 | 0 |

3. PROFITABILITAS

| PROFITABILITAS | NILAI |
|--|-------|
| Rasio Profitabilitas > 0,5 | 100 |
| Rasio Profitabilitas ≥ 0 , $\leq 0,5$ | 50 |
| Rasio Profitabilitas < 0 | 0 |

V. FORMULIR PENILAIAN USULAN BIAYA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG TERTENTU

| No | PARAMETER | NILAI |
|-------|-----------------------------------|-------|
| 1 | Usulan Harga Patokan LPG Tertentu | |
| TOTAL | | |

PENILAIAN:

USULAN HARGA PATOKAN LPG TERTENTU

| USULAN HARGA PATOKAN LPG TERTENTU | NILAI |
|---|-------|
| Usulan Harga Patokan LPG Tertentu lebih rendah minimal 10% dibawah Harga Patokan yang ditetapkan Pemerintah | 100 |
| Usulan Harga Patokan LPG Tertentu sama dengan Harga Patokan yang ditetapkan Pemerintah atau lebih rendah maksimal 10% dari Harga Patokan yang ditetapkan Pemerintah | 50 |
| Usulan Harga Patokan LPG Tertentu diatas Harga Patokan yang ditetapkan Pemerintah | 0 |
| Tidak ada Usulan Harga Patokan LPG Tertentu | 0 |

W. FORMULIR PENILAIAN KINERJA

| No | PARAMETER | NILAI |
|-------|---|-------|
| 1 | Pengalaman di bidang penyediaan dan pendistribusian LPG | |
| 2 | Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan | |
| TOTAL | | |

PENILAIAN:

1. PENGALAMAN DI BIDANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG

| PENGALAMAN DI BIDANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG | NILAI |
|--|--------------|
| Pengalaman di bidang penyediaan dan pendistribusian LPG \geq 5 Tahun | 100 |
| Pengalaman di bidang penyediaan dan pendistribusian LPG 2 Tahun s.d. 5 Tahun | 50 |
| Pengalaman di bidang penyediaan dan pendistribusian LPG \leq 2 Tahun | 25 |
| Tidak ada pengalaman di bidang penyediaan dan pendistribusian LPG | 0 |

2. KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

| KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | NILAI |
|--|--------------|
| Tidak pernah terlibat pelanggaran hukum dalam penyediaan dan pendistribusian LPG | 100 |
| Pernah terlibat pelanggaran hukum dalam penyediaan dan pendistribusian LPG | 0 |

X. REKAPITULASI PENILAIAN AKHIR

| No | PENILAIAN | NILAI | BOBOT | NILAI AKHIR |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------------|
| 1 | Teknis | | 45% | (Nilai x Bobot) |
| 2 | Keuangan | | 30% | (Nilai x Bobot) |
| 3 | Biaya Penyediaan dan Pendistribusian LPG | | 20% | (Nilai x Bobot) |
| 4 | Kinerja | | 5% | (Nilai x Bobot) |
| TOTAL | | | 100% | |

*) Ambang batas nilai \geq 75

**Y. LOKASI PENUGASAN DAN KUOTA SELEKSI PENUGASAN PENYEDIAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN LPG TERTENTU TAHUN 2022**

| No | Kabupaten/Kota | Kuota Seleksi (MT) |
|-----------|--|---------------------------|
| 1. | Kab. Aceh Barat | 38 |
| 2. | Kab. Aceh Barat Daya | 25 |
| 3. | Kab. Aceh Besar | 79 |
| 4. | Kab. Aceh Jaya | 18 |
| 5. | Kab. Aceh Selatan | 26 |
| 6. | Kab. Aceh Tamiang | 61 |
| 7. | Kab. Aceh Tengah | 36 |
| 8. | Kab. Aceh Tenggara | 31 |
| 9. | Kab. Aceh Timur | 81 |
| 10. | Kab. Aceh Utara | 118 |
| 11. | Kab. Bener Meriah | 34 |
| 12. | Kab. Bireuen | 90 |
| 13. | Kab. Gayo Luwes | 17 |
| 14. | Kab. Nagan Raya | 21 |
| 15. | Kab. Pidie | 94 |
| 16. | Kab. Pidie Jaya | 35 |
| 17. | Kab. Singkil | 17 |
| 18. | Kota Banda Aceh | 40 |
| 19. | Kota Sabang | 45 |
| 20. | Kota Langsa | 31 |
| 21. | Kota Lhokseumawe | 6 |
| 22. | Kota Subulussalam | 21 |
| | Total Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam | 963 |
| 23. | Kab. Asahan | 227 |
| 24. | Kab. Batubara | 139 |
| 25. | Kab. Dairi | 77 |
| 26. | Kab. Deli Serdang | 766 |
| 27. | Kab. Humb. Hasundutan | 40 |
| 28. | Kab. Karo | 164 |
| 29. | Kab. Labuhan Batu | 135 |
| 30. | Kab. Labuhan Batu Selatan | 70 |
| 31. | Kab. Labuhan Batu Utara | 135 |
| 32. | Kab. Langkat | 326 |
| 33. | Kab. Mandailing Natal | 63 |
| 34. | Kab. Nias | 16 |
| 35. | Kab. Nias Barat | 12 |
| 36. | Kab. Nias Selatan | 27 |
| 37. | Kab. Nias Utara | 12 |
| 38. | Kab. Padang Lawas | 40 |
| 39. | Kab. Padang Lawas Utara | 33 |
| 40. | Kab. Pakpak Barat | 10 |
| 41. | Kab. Samosir | 30 |
| 42. | Kab. Serdang Bedagai | 197 |
| 43. | Kab. Simalungun | 263 |
| 44. | Kab. Tapanuli Selatan | 68 |
| 45. | Kab. Tapanuli Tengah | 68 |
| 46. | Kab. Tapanuli Utara | 64 |
| 47. | Kab. Toba Samosir | 62 |
| 48. | Kota Binjai | 93 |
| 49. | Kota Gunung Sitoli | 30 |
| 50. | Kota Medan | 834 |

| | | |
|------|--------------------------------------|--------------|
| 51. | Kota Padang Sidempuan | 34 |
| 52. | Kota Pematang Siantar | 98 |
| 53. | Kota Sibolga | 26 |
| 54. | Kota Tanjung Balai | 45 |
| 55. | Kota Tebing Tinggi | 54 |
| | Total Provinsi Sumatera Utara | 4.259 |
| 56. | Kab. Agam | 117 |
| 57. | Kab. Dharmas Raya | 57 |
| 58. | Kab. Lima Puluh Koto | 72 |
| 59. | Kab. Padang Pariaman | 88 |
| 60. | Kab. Pasaman | 38 |
| 61. | Kab. Pasaman Barat | 82 |
| 62. | Kab. Pesisir Selatan | 97 |
| 63. | Kab. Solok | 57 |
| 64. | Kab. Solok Selatan | 30 |
| 65. | Kab. Tanah Datar | 71 |
| 66. | Kota Bukit Tinggi | 26 |
| 67. | Kota Padang | 259 |
| 68. | Kota Padang Panjang | 18 |
| 69. | Kota Payakumbuh | 53 |
| 70. | Kota Sawah Lunto | 15 |
| 71. | Kota Pariaman | 23 |
| 72. | Kota Solok | 18 |
| 73. | Kab. Sijunjung | 37 |
| | Total Provinsi Sumatera Barat | 1.158 |
| 74. | Kab. Bengkalis | 157 |
| 75. | Kab. Indragiri Hilir | 147 |
| 76. | Kab. Indragiri Hulu | 112 |
| 77. | Kab. Kampar | 197 |
| 78. | Kab. Kuantan Singingi | 79 |
| 79. | Kab. Meranti | 47 |
| 80. | Kab. Pelalawan | 96 |
| 81. | Kab. Rokan Hilir | 154 |
| 82. | Kab. Rokan Hulu | 111 |
| 83. | Kab. Siak | 130 |
| 84. | Kota Dumai | 81 |
| 85. | Kota Pekanbaru | 278 |
| | Total Provinsi Riau | 1.589 |
| 86. | Kab. Bintan | 74 |
| 87. | Kota Batam | 407 |
| 88. | Kab. Karimun | 32 |
| 89. | Kota Tanjung Pinang | 69 |
| | Total Provinsi Kepulauan Riau | 582 |
| 90. | Kab. Batanghari | 80 |
| 91. | Kab. Bungo | 52 |
| 92. | Kab. Kerinci | 33 |
| 93. | Kab. Merangin | 57 |
| 94. | Kab. Muara Jambi | 78 |
| 95. | Kab. Sarolangun | 46 |
| 96. | Kab. Tanjung Jabung Barat | 72 |
| 97. | Kab. Tanjung Jabung Timur | 62 |
| 98. | Kab. Tebo | 57 |
| 99. | Kota Jambi | 159 |
| 100. | Kota Sungai Penuh | 14 |
| | Total Provinsi Jambi | 710 |
| 101. | Kab. Bengkulu Selatan | 38 |
| 102. | Kab. Bengkulu Tengah | 30 |
| 103. | Kab. Bengkulu Utara | 69 |

| | | |
|------|--|--------------|
| 104. | Kab. Kaur | 23 |
| 105. | Kab. Kepahyang | 38 |
| 106. | Kab. Lebong | 30 |
| 107. | Kab. Muko-Muko | 42 |
| 108. | Kab. Rejang Lebong | 62 |
| 109. | Kab. Seluma | 46 |
| 110. | Kota Bengkulu | 116 |
| | Total Provinsi Bengkulu | 495 |
| 111. | Kab. Banyuasin | 219 |
| 112. | Kab. Empat Lawang | 46 |
| 113. | Kab. Lahat | 96 |
| 114. | Kab. Muara Enim | 137 |
| 115. | Kab. Musi Banyuasin | 140 |
| 116. | Kab. Musi Rawas | 81 |
| 117. | Kab. Musi Rawas Utara | 27 |
| 118. | Kab. Ogan Ilir | 87 |
| 119. | Kab. Ogan Komering Ilir | 164 |
| 120. | Kab. Ogan Komering Ulu | 122 |
| 121. | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 68 |
| 122. | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 143 |
| 123. | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 51 |
| 124. | kota Lubuk Linggau | 72 |
| 125. | Kota Pagar Alam | 41 |
| 126. | Kota Palembang | 603 |
| 127. | Kota Prabumulih | 39 |
| | Total Provinsi Sumatera Selatan | 2.136 |
| 128. | Kab. Bangka Barat | 54 |
| 129. | Kab. Bangka Induk | 88 |
| 130. | Kab. Bangka Selatan | 58 |
| 131. | Kab. Bangka Tengah | 58 |
| 132. | Kab. Belitung Barat | 40 |
| 133. | Kab. Belitung Timur | 31 |
| 134. | Kota Pangkal Pinang | 71 |
| | Total Provinsi Bangka Belitung | 400 |
| 135. | Kab. Lampung Barat | 62 |
| 136. | Kab. Lampung Selatan | 249 |
| 137. | Kab. Lampung Tengah | 236 |
| 138. | Kab. Lampung Timur | 202 |
| 139. | Kab. Lampung Utara | 119 |
| 140. | Kab. Mesuji | 58 |
| 141. | Kab. Pesawaran | 113 |
| 142. | Kab. Pesisir Barat | 41 |
| 143. | Kab. Pringsewu | 118 |
| 144. | Kab. Tanggamus | 115 |
| 145. | Kab. Tulang Bawang | 101 |
| 146. | Kab. Tulang Bawang Barat | 65 |
| 147. | Kab. Way Kanan | 85 |
| 148. | Kota Bandar Lampung | 319 |
| 149. | Kota Metro | 53 |
| | Total Provinsi Lampung | 1.937 |
| 150. | Kab. Kepulauan Seribu | 9 |
| 151. | Kota Jakarta Barat | 947 |
| 152. | Kota Jakarta Pusat | 432 |
| 153. | Kota Jakarta Selatan | 969 |
| 154. | Kota Jakarta Timur | 1.216 |
| 155. | Kota Jakarta Utara | 662 |
| | Total Provinsi DKI Jakarta | 4.235 |
| 156. | Kab. Lebak | 187 |

| | | |
|------|----------------------------------|---------------|
| 157. | Kab. Pandeglang | 233 |
| 158. | Kab. Serang | 345 |
| 159. | Kab. Tangerang | 1.140 |
| 160. | Kota Cilegon | 131 |
| 161. | Kota Serang | 214 |
| 162. | Kota Tangerang | 707 |
| 163. | Kota Tangerang Selatan | 573 |
| | Total Provinsi Banten | 3.529 |
| 164. | Kab. Bandung | 1.068 |
| 165. | Kab. Bandung Barat | 461 |
| 166. | Kab. Bekasi | 990 |
| 167. | Kab. Bogor | 1.760 |
| 168. | Kab. Ciamis | 251 |
| 169. | Kab. Cianjur | 595 |
| 170. | Kab. Cirebon | 704 |
| 171. | Kab. Garut | 578 |
| 172. | Kab. Indramayu | 530 |
| 173. | Kab. Karawang | 791 |
| 174. | Kab. Kuningan | 332 |
| 175. | Kab. Majalengka | 320 |
| 176. | Kab. Pangandaran | 77 |
| 177. | Kab. Purwakarta | 257 |
| 178. | Kab. Subang | 470 |
| 179. | Kab. Sukabumi | 717 |
| 180. | Kab. Sumedang | 290 |
| 181. | Kab. Tasikmalaya | 342 |
| 182. | Kota Bandung | 939 |
| 183. | Kota Banjar | 80 |
| 184. | Kota Bekasi | 1.002 |
| 185. | Kota Bogor | 358 |
| 186. | Kota Cimahi | 205 |
| 187. | Kota Cirebon | 89 |
| 188. | Kota Depok | 632 |
| 189. | Kota Sukabumi | 138 |
| 190. | Kota Tasikmalaya | 284 |
| | Total Provinsi Jawa Barat | 14.256 |
| 191. | Kab. Banjarnegara | 228 |
| 192. | Kab. Banyumas | 502 |
| 193. | Kab. Batang | 207 |
| 194. | Kab. Blora | 223 |
| 195. | Kab. Boyolali | 378 |
| 196. | Kab. Brebes | 560 |
| 197. | Kab. Cilacap | 535 |
| 198. | Kab. Demak | 326 |
| 199. | Kab. Grobogan | 351 |
| 200. | Kab. Jepara | 329 |
| 201. | Kab. Karanganyar | 359 |
| 202. | Kab. Kebumen | 338 |
| 203. | Kab. Kendal | 286 |
| 204. | Kab. Klaten | 419 |
| 205. | Kab. Kudus | 280 |
| 206. | Kab. Magelang | 303 |
| 207. | Kab. Pati | 361 |
| 208. | Kab. Pekalongan | 345 |
| 209. | Kab. Pemasang | 436 |
| 210. | Kab. Purbalingga | 268 |
| 211. | Kab. Purworejo | 202 |
| 212. | Kab. Rembang | 171 |

| | | |
|------|---------------------------------------|---------------|
| 213. | Kab. Semarang | 431 |
| 214. | Kab. Sragen | 353 |
| 215. | Kab. Sukoharjo | 315 |
| 216. | Kab. Tegal | 516 |
| 217. | Kab. Temanggung | 251 |
| 218. | Kab. Wonogiri | 273 |
| 219. | Kab. Wonosobo | 209 |
| 220. | Kota Magelang | 66 |
| 221. | Kota Pekalongan | 139 |
| 222. | Kota Salatiga | 88 |
| 223. | Kota Semarang | 774 |
| 224. | Kota Surakarta | 291 |
| 225. | Kota Tegal | 105 |
| | Total Provinsi Jawa Tengah | 11.217 |
| 226. | Kab. Bantul | 326 |
| 227. | Kab. Gunung Kidul | 153 |
| 228. | Kab. Kulon Progo | 142 |
| 229. | Kab. Sleman | 387 |
| 230. | Kota Yogyakarta | 218 |
| | Total Provinsi D.I. Yogyakarta | 1.227 |
| 231. | Kab. Bangkalan | 212 |
| 232. | Kab. Banyuwangi | 551 |
| 233. | Kab. Batu | 121 |
| 234. | Kab. Blitar | 294 |
| 235. | Kab. Bojonegoro | 359 |
| 236. | Kab. Bondowoso | 161 |
| 237. | Kab. Gresik | 481 |
| 238. | Kab. Jember | 680 |
| 239. | Kab. Jombang | 502 |
| 240. | Kab. Kediri | 562 |
| 241. | Kab. Lamongan | 504 |
| 242. | Kab. Lumajang | 317 |
| 243. | Kab. Madiun | 223 |
| 244. | Kab. Magetan | 205 |
| 245. | Kab. Malang | 982 |
| 246. | Kab. Mojokerto | 450 |
| 247. | Kab. Nganjuk | 368 |
| 248. | Kab. Ngawi | 184 |
| 249. | Kab. Pacitan | 96 |
| 250. | Kab. Pamekasan | 234 |
| 251. | Kab. Pasuruan | 583 |
| 252. | Kab. Ponorogo | 224 |
| 253. | Kab. Probolinggo | 277 |
| 254. | Kab. Sampang | 208 |
| 255. | Kab. Sidoarjo | 901 |
| 256. | Kab. Situbondo | 193 |
| 257. | Kab. Sumenep | 254 |
| 258. | Kab. Trenggalek | 201 |
| 259. | Kab. Tuban | 400 |
| 260. | Kab. Tulungagung | 398 |
| 261. | Kota Blitar | 67 |
| 262. | Kota Kediri | 159 |
| 263. | Kota Madiun | 95 |
| 264. | Kota Malang | 360 |
| 265. | Kota Mojokerto | 47 |
| 266. | Kota Pasuruan | 91 |
| 267. | Kota Probolinggo | 119 |
| 268. | Kota Surabaya | 1.132 |

| | | |
|------|---|---------------|
| | Total Provinsi Jawa Timur | 13.193 |
| 269. | Kab. Badung | 248 |
| 270. | Kab. Bangli | 188 |
| 271. | Kab. Buleleng | 256 |
| 272. | Kab. Gianyar | 238 |
| 273. | Kab. Jembrana | 160 |
| 274. | Kab. Karangasem | 192 |
| 275. | Kab. Klungkung | 134 |
| 276. | Kab. Tabanan | 229 |
| 277. | Kota Denpasar | 502 |
| | Total Provinsi Bali | 2.147 |
| 278. | Kab. Lombok Barat | 162 |
| 279. | Kab. Lombok Tengah | 244 |
| 280. | Kab. Lombok Timur | 293 |
| 281. | Kab. Lombok Utara | 54 |
| 282. | Kota Mataram | 187 |
| 283. | Kab. Sumbawa | 90 |
| 284. | Kab. Dompu | 45 |
| 285. | Kab. Bima | 55 |
| 286. | Kab. Sumbawa Barat | 24 |
| 287. | Kota Bima | 28 |
| | Total Provinsi Nusa Tenggara Barat | 1.181 |
| 288. | Kab. Bengkayang | 66 |
| 289. | Kab. Kapuas Hulu | 50 |
| 290. | Kab. Kayong Utara | 29 |
| 291. | Kab. Ketapang | 102 |
| 292. | Kab. Kubu Raya | 152 |
| 293. | Kab. Landak | 61 |
| 294. | Kab. Melawi | 43 |
| 295. | Kab. Mempawah | 92 |
| 296. | Kab. Sambas | 124 |
| 297. | Kab. Sanggau | 103 |
| 298. | Kab. Sekadau | 39 |
| 299. | Kab. Sintang | 93 |
| 300. | Kota Pontianak | 222 |
| 301. | Kota Singkawang | 76 |
| | Total Provinsi Kalimantan Barat | 1.254 |
| 302. | Kab. Barito Selatan | 26 |
| 303. | Kab. Barito Timur | 36 |
| 304. | Kab. Barito Utara | 22 |
| 305. | Kab. Gunung Mas | 23 |
| 306. | Kab. Kapuas | 88 |
| 307. | Kab. Katingan | 26 |
| 308. | Kab. Kotawaringin Barat | 37 |
| 309. | Kab. Kotawaringin Timur | 94 |
| 310. | Kab. Lamandau | 10 |
| 311. | Kab. Murung Raya | 15 |
| 312. | Kab. Pulang Pisau | 33 |
| 313. | Kab. Seruyan | 21 |
| 314. | Kab. Sukamara | 6 |
| 315. | Kota Palangkaraya | 88 |
| | Total Provinsi Kalimantan Tengah | 524 |
| 316. | Kab. Balangan | 26 |
| 317. | Kab. Banjar | 134 |
| 318. | Kab. Barito Kuala | 76 |
| 319. | Kab. Hulu Sungai Selatan | 66 |
| 320. | Kab. Hulu Sungai Tengah | 68 |
| 321. | Kab. Hulu Sungai Utara | 54 |

| | | |
|------|--|--------------|
| 322. | Kab. Kotabaru | 57 |
| 323. | Kab. Tabalong | 50 |
| 324. | Kab. Tanah Bumbu | 58 |
| 325. | Kab. Tanah Laut | 89 |
| 326. | Kab. Tapin | 44 |
| 327. | Kota Banjar Baru | 62 |
| 328. | Kota Banjarmasin | 186 |
| | Total Provinsi Kalimantan Selatan | 970 |
| 329. | Kab. Berau | 65 |
| 330. | Kab. Kutai Barat | 62 |
| 331. | Kab. Kutai Kertanegara | 269 |
| 332. | Kab. Kutai Timur | 93 |
| 333. | Kab. Mahakam Ulu | 5 |
| 334. | Kab. Paser | 59 |
| 335. | Kab. Penajam Paser Utara | 45 |
| 336. | Kota Balikpapan | 184 |
| 337. | Kota Bontang | 46 |
| 338. | Kota Samarinda | 271 |
| | Total Provinsi Kalimantan Timur | 1.099 |
| 339. | Kab. Bulungan | 46 |
| 340. | Kab. Malinau | 8 |
| 341. | Kab. Nunukan | 26 |
| 342. | Kab. Tanah Tidung | 5 |
| 343. | Kota Tarakan | 35 |
| | Total Provinsi Kalimantan Utara | 120 |
| 344. | Kab. Bolmong | 48 |
| 345. | Kab. Bolmong Selatan | 18 |
| 346. | Kab. Bolmong Timur | 15 |
| 347. | Kab. Bolmong Utara | 17 |
| 348. | Kab. Minahasa | 120 |
| 349. | Kab. Minahasa Selatan | 81 |
| 350. | Kab. Minahasa Tenggara | 49 |
| 351. | Kab. Minahasa Utara | 76 |
| 352. | Kota Bitung | 70 |
| 353. | Kota Kotamobagu | 62 |
| 354. | Kota Manado | 177 |
| 355. | Kota Tomohon | 46 |
| | Total Provinsi Sulawesi Utara | 780 |
| 356. | Kab. Boalemo | 31 |
| 357. | Kab. Bone Bolango | 44 |
| 358. | Kab. Gorontalo | 112 |
| 359. | Kab. Gorontalo Utara | 34 |
| 360. | Kab. Pohuwato | 38 |
| 361. | Kota Gorontalo | 62 |
| | Total Provinsi Gorontalo | 321 |
| 362. | Kab. Banggai Daratan | 82 |
| 363. | Kab. Buol | 17 |
| 364. | Kab. Donggala | 59 |
| 365. | Kab. Morowali | 17 |
| 366. | Kab. Morowali Utara | 18 |
| 367. | Kab. Parigi Moutong | 71 |
| 368. | Kab. Poso | 34 |
| 369. | Kab. Sigi | 39 |
| 370. | Kab. Tojo Una-Una | 23 |
| 371. | Kab. Toli-Toli | 34 |
| 372. | Kota Palu | 124 |
| | Total Provinsi Sulawesi Tengah | 519 |
| 373. | Kab. Bombana | 55 |

| | | |
|------|---|---------------|
| 374. | Kab. Kolaka | 64 |
| 375. | Kab. Kolaka Timur | 33 |
| 376. | Kab. Kolaka Utara | 36 |
| 377. | Kab. Konawe | 86 |
| 378. | Kab. Konawe Kepulauan | 13 |
| 379. | Kab. Konawe Selatan | 75 |
| 380. | Kab. Konawe Utara | 21 |
| 381. | Kota Kendari | 121 |
| | Total Provinsi Sulawesi Tenggara | 505 |
| 382. | Kab. Bantaeng | 59 |
| 383. | Kab. Barru | 65 |
| 384. | Kab. Bone | 185 |
| 385. | Kab. Bulukumba | 115 |
| 386. | Kab. Enrekang | 58 |
| 387. | Kab. Gowa | 223 |
| 388. | Kab. Jeneponto | 88 |
| 389. | Kab. Selayar | 40 |
| 390. | Kab. Luwu | 93 |
| 391. | Kab. Luwu Timur | 94 |
| 392. | Kab. Luwu Utara | 78 |
| 393. | Kab. Maros | 128 |
| 394. | Kab. Pangkep | 115 |
| 395. | Kab. Pinrang | 116 |
| 396. | Kab. Sidenreng Rappang | 115 |
| 397. | Kab. Sinjai | 63 |
| 398. | Kab. Soppeng | 88 |
| 399. | Kab. Takalar | 111 |
| 400. | Kab. Tana Toraja | 46 |
| 401. | Kab. Toraja Utara | 47 |
| 402. | Kab. Wajo | 146 |
| 403. | Kota Makassar | 545 |
| 404. | Kota Palopo | 85 |
| 405. | Kota Pare Pare | 55 |
| | Total Provinsi Sulawesi Selatan | 2.759 |
| 406. | Kab. Majene | 40 |
| 407. | Kab. Mamuju Utara | 32 |
| 408. | Kab. Polewali Mandar | 94 |
| 409. | Kab. Mamasa | 18 |
| 410. | Kab. Mamuju | 71 |
| 411. | Kab. Mamuju Tengah | 35 |
| | Total Provinsi Sulawesi Barat | 290 |
| | Total Provinsi | 74.353 |

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Ditandatangani secara elektronik

TUTUKA ARIADJI